

4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo, Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah salah satu urusan yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan. Selain itu, Urusan Perumahan dan Permukiman juga dilaksanakan oleh perangkat daerah lain sebagai pendukung pelaksanaan program atau kegiatan antara lain BPBD, Kelurahan Selomerto, Kelurahan Mudal, Kelurahan Garung, Kecamatan Kalikajar, dan Kelurahan Kepil.

a. Alokasi Pendanaan

Anggaran yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2020 sebesar Rp12.100.925.060,00 sedangkan realisasi anggarannya sebesar Rp10.915.382.005,00 atau 90.20%.

Alokasi anggaran per program pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2020 dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel III.A.4.1

Program, Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
A	Belanja Langsung	12.100.925.060	10.915.382.005	90,20
1	Program peningkatan disiplin aparatur	114.396.500	113.203.000	98,96
2	Program Pengembangan Perumahan	10.455.903.560	9.572.873.175	91,55
3	Program Lingkungan Sehat Perumahan	1.530.625.000	1.229.305.830	80,31

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo 2020 (diolah)

b. Program dan Kegiatan

1) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program peningkatan disiplin aparatur ditujukan untuk peningkatan kualitas aparatur dalam pelaksanaan tugas. Kedisiplinan aparatur merupakan hal yang mutlak diperlukan dalam pencapaian tujuan maupun sasaran kinerja perangkat daerah. Oleh karena itu, pada tahun 2020 dilaksanakan upaya peningkatan disiplin aparatur yang diwujudkan dengan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya bagi aparatur yang ada pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan.

2) Program Pengembangan Perumahan

Program pengembangan perumahan ditujukan untuk pengembangan maupun penyediaan rumah yang layak di Kabupaten Wonosobo. Program Pengembangan Perumahan dilaksanakan dalam kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu, pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat, penataan lingkungan kelurahan, fasilitasi pengembangan prasarana infrastruktur ekonomi wilayah (pisew), penataan lingkungan kumuh, dan pendamping peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH).

Kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu digunakan untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi di tingkat kecamatan. Dalam rangka pelaksanaan program pengembangan perumahan masyarakat kurang mampu, kegiatan bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah sebanyak 345 unit. Sedangkan sumber dana dari APBD Kabupaten Wonosobo sebanyak 312 unit yang dilaksanakan di tingkat kelurahan melalui kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu di Kelurahan Leksono, Andongsili dan Kejajar.

Sedangkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat digunakan sebagai fasilitasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian PUPR. BSPS merupakan bantuan Pemerintah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan rumah baru. Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Wonosobo mendapat alokasi dana dari Kementerian PUPR melalui program BSPS sebanyak 1.035 unit. Bentuk fasilitasi dari kegiatan APBD Kabupaten Wonosobo tersebut diwujudkan dalam kegiatan pelaporan BSPS strategis dan BSPS SNVT.

Kegiatan penataan lingkungan kelurahan merupakan suatu kegiatan di lingkup permukiman dengan membangun lingkungan fisik yang sehat, tertib, selaras, dan lestari. Salah satu tujuan penataan lingkungan adalah mewujudkan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih, sehat melalui peningkatan kualitas pelayanan lingkungan perumahan, sarana dan prasarana.

Pada intinya, dengan adanya kegiatan penataan lingkungan kelurahan diharapkan seluruh warga berpartisipasi, bergotong-royong untuk menjaga dan menata kembali lingkungan hidup bersama-sama. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 50 lokasi yang tersebar di beberapa kelurahan yang ada di Kabupaten Wonosobo.

III.A.4. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kegiatan fasilitasi pengembangan prasarana infrastruktur ekonomi wilayah (PISEW) digunakan untuk fasilitasi program sektoral dari Kementerian PUPR yaitu Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW). Program PISEW ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, pengentasan kemiskinan, memperbaiki tata kelola pemerintah daerah, serta memperkuat kelembagaan masyarakat tingkat desa. Pada tahun 2020 kegiatan PISEW diarahkan untuk peningkatan sektor ekonomi masyarakat dengan pembangunan jalan penghubung antar desa di Kecamatan Watuamalang berupa betonisasi jalan desa di Desa Binangun dan Desa Lumajang.

Pada program ini juga dilakukan kegiatan Penataan Lingkungan Kumuh. Beberapa faktor pendorong timbulnya permukiman kumuh di perkotaan adalah arus urbanisasi penduduk, kondisi sosial ekonomi masyarakat, kondisi sosial budaya masyarakat, dan karakteristik fisik alami. Padatnya jumlah penduduk di kawasan perkotaan berdampak pada peningkatan kebutuhan akan hunian serta peningkatan harga lahan. Namun di sisi lain, pemerintah memiliki keterbatasan untuk menyediakan permukiman baru yang terjangkau bagi masyarakat marginal, sehingga kepadatan penduduk tersebut menimbulkan dampak permukiman kumuh dalam kehidupan di kota. Perkembangan permukiman kumuh lambat laun akan bertambah luasannya apabila pemerintah tidak dilakukan penataan. Pada tahun 2020, kegiatan penataan lingkungan kumuh digunakan untuk konsultan andalalin KOTAKU dan difokuskan di Kelurahan Jaraksari dalam bentuk penyusunan dokumen rencana penataan yaitu penyusunan FS skala Jaraksari, Larap/RPL skala kawasan Jaraksari, penyusunan DED jalan lingkungan dan drainase seruni serta penyusunan DED jalan lingkungan dan drainase Jaraksari.

Pada program pengembangan perumahan juga dilaksanakan kegiatan terkait fasilitasi DAK bidang perumahan yaitu dengan kegiatan Pendamping Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Pada tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Wonosobo mendapatkan alokasi dana DAK untuk peningkatan RTLH dengan jumlah sasaran sebanyak 103 unit rumah. Alokasi ini mendukung penurunan/penanganan rumah tidak layak huni di Kabupaten Wonosobo.

3) Program Lingkungan Sehat Perumahan

Program ini diarahkan untuk pembangunan kawasan permukiman kumuh untuk menurunkan tingkat pencemaran lingkungan oleh limbah padat, cair dan udara di lingkungan permukiman dan meningkatkan kelayakan dan kesehatan kondisi lingkungan permukiman. Program tersebut dilaksanakan untuk menunjang sasaran pokok pencapaian indikator peningkatan cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) serta peningkatan akses sanitasi/ jamban bagi masyarakat.

Guna mencapai peningkatan kualitas lingkungan, dijabarkan dalam kegiatan pembangunan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat (SLBM), fasilitasi pengembangan kawasan (PISEW), Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan, dan fasilitasi jambanisasi Desa. Kegiatan tersebut dilaksanakan dan tersebar di Kelurahan Jlamprang, Kejiwan, Kramatan, Bumireso, Kalianget, Kertek, Wringinanom, Wonorejo, Wonoroto dan Kalikajar.

III.A.4. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

c. Capaian Kinerja

Capaian kinerja urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.A.4.2

Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Berdasarkan Indikator RKPD Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Program	Capaian 2019	2020				Target RPJMD 2021
			Target	Capaian	% Realisasi	Status Capaian	
1	Rasio Rumah Layak huni	0,776	0,904	0,751	83,11	T	0,914
2	Kekurangan tempat tinggal (<i>backlog</i>) berdasarkan perspektif menghuni	52,41	30.266	36.615	79,02	T	29.415
3	Cakupan rumah layak terjangkau	5,37%	9%	6%	67	S	10%
4	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	139,62	0,950	0,7335	77,21	T	1
5	Persentase rumah yang diperbaiki akibat bencana	125%	80%	0	0	SR	100%

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, 2020

Keterangan Status Capaian:

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Simbol	Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja Indikator
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	ST	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2	76 % ≤ 90%	Tinggi	T	
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	S	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	R	pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih

III.A.4. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Simbol	Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja Indikator
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	SR	dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan

Sumber: Skala Nilai Peringkat Kinerja (Permendagri No. 86 Tahun 2017)

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan capaian Kinerja Program Urusan perumahan dan kawasan permukiman pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- Terdapat 5 (lima) indikator Kinerja Program urusan perumahan dan kawasan permukiman
- Realisasi Kinerja Program Kategori Tinggi sebanyak 3 (tiga) indikator
- Realisasi Kinerja Program Kategori Tinggi sebanyak 1 (satu) indikator
- Realisasi Kinerja Program Kategori Sangat Rendah sebanyak 1 (satu) indikator

Pada urusan perumahan dan kawasan permukiman, terdapat 3 indikator yang menunjukkan capaian realisasi kinerja yang tinggi yaitu rasio rumah layak huni, kekurangan tempat tinggal (*backlog*) berdasarkan perspektif menghuni, dan Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk. Secara kinerja capaian, indikator rasio rumah layak huni masuk pada kategori tinggi meskipun secara target belum tercapai. Dengan capaian tersebut berarti secara angka terjadi kenaikan jumlah rumah yang layak huni yang tertangani melalui program dan kegiatan tahun 2020.

Sedangkan pada indikator kekurangan tempat tinggal (*backlog*), masuk dalam kategori capaian kinerja tinggi. Akan tetapi secara angka, jumlah kekurangan tempat tinggal mengalami peningkatan pada tahun 2020. Hal ini disebabkan penambahan penduduk yang memerlukan tempat tinggal lebih besar dibandingkan upaya penambahan penyediaan tempat tinggal. Ke depan perlu diformulasikan rencana penyediaan tempat tinggal yang dapat mencukupi kebutuhan sesuai dengan penambahan penduduk termasuk pemetaan lokasi kebutuhan lahan yang sesuai dengan ketentuan pemanfaatan lahan.

Selain itu, indikator yang masuk dalam kategori capaian kinerja tinggi yaitu Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk. Hal ini berarti dengan penambahan ketersediaan tempat pemakaman umum masih memadai untuk melayani jumlah penduduk di Wonosobo hingga tahun 2020. Namun demikian jika dilihat dari nilai rasio, terjadi penurunan yang menandakan penambahan jumlah penduduk belum diimbangi dengan penambahan luasan lahan pemakaman umum.

Pada indikator cakupan rumah layak huni terjangkau, capaian kinerja masuk dalam kategori sedang. Cakupan ketersediaan rumah layak huni merupakan cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Dengan tingkat capaian pada kategori sedang, ketersediaan rumah layak huni masih perlu dioptimalkan.

Adapun indikator persentase rumah yang diperbaiki akibat bencana, kategori capaian

III.A.4. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

kinerja sangat rendah. Capaian ini karena pada tahun 2020 tidak dialokasikan anggaran untuk perbaikan rumah akibat bencana sehingga tidak ada perbaikan pada rumah terkena bencana. Hal ini perlu mendapat perhatian, agar ke depan korban bencana bisa mendapatkan layanan perbaikan rumah termasuk penanganan terhadap rumah/tempat tinggal di daerah rawan bencana risiko tinggi mengingat sebagian besar wilayah Kabupaten Wonosobo merupakan kawasan rawan bencana.

d. Tindak Lanjut atas Rekomendasi / Catatan DPRD

Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019, hasil pembahasan DPRD Kabupaten Wonosobo tidak memberikan rekomendasi/ catatan khusus yang perlu ditindaklanjuti. Namun demikian, beberapa permasalahan yang tertuang dalam matriks permasalahan dan solusi belum sepenuhnya bisa diselesaikan dan masih memerlukan penyelesaian pada masa mendatang.

e. Permasalahan dan Solusi

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2020 disajikan dalam Tabel Matriks Permasalahan dan Solusi sebagai berikut:

Tabel III.A.4.3
Matriks Permasalahan dan Solusi Urusan Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman

No.	Permasalahan	Solusi
1	Angka cakupan rumah layak huni belum maksimal	Perlu adanya fasilitasi untuk masyarakat (khususnya MBR) baik melalui pemberian bantuan biaya pembelian, pembangunan, perbaikan rumah, penyediaan lahan murah.
2	Angka kekurangan tempat tinggal (<i>backlog</i>) masih tinggi	- Perlunya penetapan lokasi permukiman sesuai kriteria ruang yang memperhatikan arahan pengembangan wilayah, kebencanaan dan ketahanan pangan. - Memberikan kemudahan perizinan pada lahan untuk permukiman yang sesuai rencana tata ruang - Mulai inisiasi pembangunan rumah susun (<i>vertical housing</i>) untuk masyarakat umum (bukan mahasiswa) dibanding rumah tapak (<i>landed housing</i>)
3	Keberadaan rumah dan permukiman pada zona kawasan rawan bencana tinggi (khususnya longsor)	- Edukasi, mitigasi dan adaptasi pengaturan zonasi pada rumah dengan kerawanan bencana tinggi. - Peringatan dini terhadap terjadinya bencana. - Koordinasi dengan BPBD.

III.A.4. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	Permasalahan	Solusi
4	Penanganan/pembangunan rumah korban bencana belum semuanya terlayani.	Perlunya integrasi data korban bencana dan pendanaan khusus bagi penanganan rumah korban bencana.
5	Kecenderungan alokasi dana APBD untuk urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang terlalu kecil dibandingkan dengan target capaian dan permasalahan yang harus ditangani	Perlunya reformulasi kebijakan/politik alokasi anggaran pada Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman.